



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 23 November 2020

Halaman: 2

KAWASAN KUMUH YOGYA TERSISA 70,87 HEKTARE

Penanganan Diusulkan Lagi Tahun Depan

UMBULHARJO (MERAPI) - Penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta yang tertunda tahun 2020 karena anggaran dialihkan untuk Covid-19, diusulkan kembali pada tahun 2021. Terutama penanganan kumuh dalam APBD Kota Yogyakarta tahun 2021 dan APBN tahun 2021.

Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Sigit Setiawan mengutarakan, penanganan kawasan kumuh yang menggunakan APBD dan APBN tahun 2020 ditunda. Mengingat anggaran di pemerintah daerah dan pusat difokuskan untuk penanganan Covid-19.

"Makanya kami usulkan kembali pe-

nananganan kawasan kumuh untuk tahun anggaran 2021 agar luasannya berkurang," kata Sigit, Minggu (22/11).

Ia menjelaskan penataan kawasan kumuh yang akan diusulkan dalam APBD Kota Yogyakarta tahun 2021 di antaranya di Kelurahan Warungboto, Klitren dan Gunungketur. Nilai anggaran untuk penataan kawasan kumuh di Warungboto diusulkan sekitar Rp 1,8 miliar, Gunungketur Rp 600 juta dan Klitren Rp 2 miliar.

Sedangkan yang akan diusulkan dalam APBN tahun 2021 adalah penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Gowongan, Terban dan Wirogunan. Total alokasi anggaran dalam APBN tahun 2021 untuk penanganan kumuh sekitar Rp 18,9 miliar.

"Di lokasi itu memang ada RT atau RW yang sebenarnya sudah memenuhi skor sebagai kawasan tidak kumuh. Tetapi masih masuk dalam bagian penanganan untuk menuntaskan penataan, terutama masalah sanitasi," paparnya.

Menurutnya jika usulkan penanganan kawasan kumuh tahun 2021 tersebut disetujui maka bisa mengurangi luas kawasan kumuh di Kota Yogya sekitar 10,63 hektare. Saat ini total kawasan kumuh di Kota Yogyakarta sekitar 70,87 hektare. Jumlah luasan tersebut adalah total saat penanganan kawasan kumuh tahun 2020 bisa tuntas dikerjakan. "Penanganan kawasan kumuh di tahun 2020 hanya di wilayah bantaran Sungai Winongo yang meng-

gunakan dana bantuan dari World Bank," ujar Sigit.

Penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Winongo tahun 2020 meliputi wilayah Kelurahan Pakuncen, Pringgokusuman, dan Tegalrejo. Total alokasi anggaran dari World Bank untuk penanganan kumuh di bantaran Sungai Winongo mencapai sekitar Rp 14 miliar.

"Penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Winongo mengacu konsep seperti yang sudah dilakukan di bantaran Sungai Gajah Wong di wilayah Muja Muju dan Giwangan yang satu paket dengan dana World Bank. Ada jalan lingkungan, penataan dengan memundurkan permukiman, ipal komunal dan jaringan hidran," ucapnya. (Tri)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005